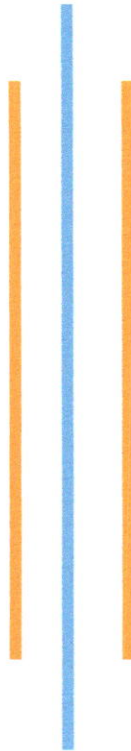




**PERJANJIAN KINERJA TA. 2025  
( ESELON III,IV)**



**KECAMATAN MANGKUTANA  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2025**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DARMAWATI, SE**

Jabatan : CAMAT MANGKUTANA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM**

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

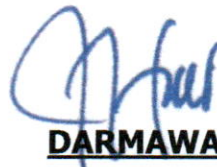
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
**Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM**

Mangkutana, 8 Juli 2025

Pihak Pertama,  
CAMAT MANGKUTANA,

  
**DARMAWATI, SE**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA**  
**TAHUN 2025**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Mangkutana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.50
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,65

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KANTOR CAMAT MANGKUTANA  
TAHUN ANGGARAN : 2025

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %
3.	Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100 %
4.	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %
5.	Meningkatnya Capaian Kinerja pada Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berjalan sesuai Standard an Ketentuan Perundangan yang Berlaku	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2,702,750,400,-	APBD
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Rp. 10,745,500,-	APBD
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 65,239,400.-	APBD
3. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Rp. 12,680,600.-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 27,348,100,-	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<u>Rp. 16,181,800,-</u>	APBD
	<b>Rp. 2,834,945,800,-</b>	

Mangkutana, 8 Juli 2025

Pihak Pertama,  
CAMAT MANGKUTANA,



**DARMAWATI, SE**

Pihak Kedua,  
BUPATI LUWU TIMUR,



**Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM**



**LAMPIRAN PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA  
KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA  
TAHUN 2025**

**1. Penjelasan Sasaran Kinerja 1**

**Uraian Sasaran :**

Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangkutana. yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah derajat mutu pelayanan pada Kantor Kecamatan Mangkutana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan Kantor Kecamatan Mangkutana merupakan hal yang sangat penting karena Kantor Kecamatan merupakan unit pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, segala macam bentuk pelayanan diberikan mulai dari pelayanan administrasi hingga pelayanan langsung yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan public secara berkala;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public adalah melalui penyusunan indiks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan Kantor Kecamatan Mangkutana</li> <li>• Indeks kepuasan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya</li> </ul>	<p>Pelayanan yang bermutu/berkualitas merupakan salah satu tolak ukurnya kepuasan yang berefek terhadap keinginan masyarakat untuk kembali datang ke Kantor Kecamatan. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang diterima masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi faktor kepuasan pelanggan karena, dengan memberikan pelayanan yang baik maka pelanggan pun akan merasa nyaman. Tingkat kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat</p>	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Perunsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times 100$	Hasil Kuisioner

		masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public (Kantor Kecamatan Mangkutana) dengan pengisian kuesioner.		
--	--	--	--	--

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaraan target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditahun 2025 di tetapkan dengan target 87,50 dan dalam pelaksanaannya diharapkan dpt tercapai 100%.</p> <p>Target kinerja tahun 2025 pada indikator ini berdasarkan Renstra sudah tercapai dengan melihat capaian kinerja tahun 2024, sehingga untuk penetapan target di PK 2025 berbeda dengan target Renstra 2025 karena disesuaikan dengan realisasi IKM Tahun 2024 sehingga lebih relevan dan terukur</p>

## Penjelasan Kinerja 2

### Uraian sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah Daerah	Dengan Semakin tinggi Nilai SAKIP Daerah maka semakin baik peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hasil Pemeriksaan Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat



### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penejelasan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,65	<p>Nilai SAKIP ditahun 2025 di tetapkan target 72,65 dan dalam pelaksanaannya diharapkan dpt tercapai 100%.</p> <p>Terjadi perbedaan target antara renstra Kecamatan Mangkutana Kab. Luwu Timur dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Renstra Kec. Mangkutana yaitu 71,60. Dikarenakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi melebihi target nlai sakip tahun 2024 yakni 72,60, sehingga untuk target indikator kinerja tahun 2025 mengikuti capaian realisasi.</p>



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMUEL NASRANI, S.IP**

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DARMAWATI, SE**

Jabatan : CAMAT MANGKUTANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
CAMAT MANGKUTANA,



**DARMAWATI, SE**

Mangkutana, 8 Juli 2025

Pihak Pertama,  
SEKRETARIS CAMAT,

**SAMUEL NASRANI, S.IP**

**LAMPORAN I PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIS CAMAT  
KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA  
TAHUN 2025**

SATUAN KERJA PERANGKAT D AERAH : KANTOR CAMAT MANGKUTANA  
TAHUN ANGGARAN : 2025

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(5)</i>
A.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai Standar (%)	100%
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu	100%
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang terselenggara dengan Baik	100%
4	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselenggara dengan baik	100%
5	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang diselenggarakan dengan baik	100%
6	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah LDaerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselenggarakan dengan baik	100%
7	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang di selenggarakan dengan baik	100%
8	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rp. 2,702,750,400,-	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 28,403,700,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2,143,979,820,-	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 12,712,000,-	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 16,625,200,-	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 215,130,580,-	APBD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 45,901,000,-	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 171,538,100,-	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 68,460,000,-	APBD

CAMAT MANGKUTANA



(**DARMAWATI, SE**)

Mangkutana, 8 Juli 2025  
SEKRETARIS CAMAT

(**SAMUEL NASRANI, S.IP**)



**LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIS CAMAT  
KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025**

**Penjelasan Kinerja**

**Uraian Sasaran**

Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 8 (delapan) sasaran kegiatan. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan penunjang urusan pemerintah daerah secara wajar, efisien dan efektif sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan public secara berkala;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 8 (delapan) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

N o	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu dimana dalam pelaksanaannya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dilakukan pada periode-periode	Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi akan berdampak besar pada pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung, sedang berlangsung	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang telah disusun di bagi dengan Jumlah dokumen yang ditargetkan dikali 100	Hasil penyusunan laporan dokumen perencanaan

	tertentu sehingga penyusunan dokumen dimaksud harus dilakukan tepat waktu agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.	dan yang akan berlangsung.		
2	Perentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dimana penyelenggaraan administrasi keuangan harus dilaksanakan dengan tertib sesuai aturan yang berlaku.	Pelaksanaan administrasi keuangan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu organisasi, melaksanakan administrasi keuangan dengan baik merupakan pondasi yang kuat untuk stabilitas dan pertumbuhan organisasi (kantor kecamatan tomoni)	Hasil pelaksanaan administrasi keuangan dibagi dengan target administrasi keuangan di kali 100	Laporan administrasi keuangan
3	Persentase administrasi BMD yang terselenggara dengan baik mengacu pada sejauh mana pengelolaan dan pengadministrasian aset daerah dilakukan secara efektif dan efisien.	Administrasi BMD yang terselenggara dengan baik merupakan serangkaian proses dan praktik yang efisien dalam pengelolaan aset daerah mencakup inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan, hingga pelaporan yang akurat	Hasil rekon aset	Laporan hasil rekon aset (barang milik daerah)
4	Persentase administrasi	Administrasi kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	Laporan administrasi

	kepegawaian yang terselenggara dengan baik mengacu pada seberapa efektif dan efisien suatu organisasi dalam mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia	yang terselenggara dengan baik mencakup serangkaian proses dan sistem yang efektif dan efisien dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi, administrasi kepegawaian yang terselenggara dengan baik akan berkontribusi pada kinerja organisasi secara keseluruhan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan pegawai	yang dilaksanakan di bagi target laporan di kali 100	i kepegawaia n
5	Persentase administrasi umum yang diselenggarakan dengan baik mengacu pada seberapa efektif dan efisien suatu organisasi dalam mengelola kegiatan administratif yang mendukung operasionalnya	Administrasi umum yang terselenggara dengan baik mencakup pengelolaan berbagai fungsi administratif yang mendukung operasional suatu organisasi, administrai umum yang terselenggara dengan baik akan berkontribusi pada kelancaran operasional	Capaian kinerja sub kegiatan dibagi target kegiatan di kali 100	Capaian kinerja sub kegiatan

		organisasai, meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mendukung pencapaian tujuan strategis		
6	Persentase Pengadaan BMD yang diselenggarakan dengan baik mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang milik daerah	Pengadaan barang milik daerah yang terselenggara dengan baik mencakup pengelolaan berbagai fungsi administratif yang mendukung operasional suatu organisasi, pengadaan BMD yang terselenggara dengan baik akan berkontribusi pada efektivitas penggunaan anggaran hingga peningkatan kualitas pelayanan public.	Capaian kinerja sub kegiatan dibagi target kegiatan di kali 100	Capaian kinerja sub kegiatan
7	Persentase penyediaan jasa penunjang yang diselenggarakan dengan baik, Persentase penyediaan jasa penunjang yang diselenggarakan dengan baik dapat bervariasi tergantung pada jenis jasa dan konteksnya. Untuk mengukur hal ini, biasanya dilakukan survei atau evaluasi terhadap kepuasan pelanggan,	Penyediaan jasa penunjang yang terselenggara dengan baik melibatkan serangkaian proses untuk memastikan bahwa layanan tambahan yang mendukung operasional organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan penyediaan jasa penunjang yang	Capaian kinerja sub kegiatan dibagi target kegiatan di kali 100	Capaian kinerja sub kegiatan



	kualitas layanan, dan efisiensi operasional	terselenggara dengan baik, organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan, mendukung operasional sehari-hari dan mendukung pencapaian tujuan strategis		
8	Persentase pemeliharaan BMD yang diselenggarakan dengan baik, mengacu pada tingkat efektivitas dan efisiensi dalam menjaga dan merawat asset milik daerah	Pemeliharaan BMD yang diselenggarakan dengan baik mencakup berbagai proses yang bertujuan untuk menjaga dan merawat asset agar tetap dalam kondisi optimal, dengan melaksanakan pemeliharaan BMD dengan baik, organisasi dapat memastikan asset tetap berfungsi dengan baik, mengurangi biaya perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan public	Capaian kinerja sub kegiatan dibagi target kegiatan di kali 100	Capaian kinerja sub kegiatan

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penjelasan
1	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu	100	Target yang ditetapkan menunjukkan kondisi ideal (tertinggi) yang bisa di capai oleh Kantor Kecamatan Mangkutana
	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik		
	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang terselenggara dengan Baik		
	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah yang terselesaikan dengan baik		
	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselenggara dengan baik		
	Persentase Administrasi Umum yang diselenggarakan dengan baik		
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselenggarakan dengan baik		
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang di selenggarakan dengan baik		
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik		



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MERI, S.Pi**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAMUEL NASRANI, S.IP**

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangkutana, 8 Juli 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

  
**MERI, S.Pi**

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS CAMAT,

  
**SAMUEL NASRANI, S.IP**

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KANTOR CAMAT MANGKUTANA  
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
<b>A.</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu</b>	<b>100%</b>
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dok
2.	Tersedianya dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	2 Dok
3.	Tersedianya dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	2 Dok
4.	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
<b>B.</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>
5.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian	12 Dok
6.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Org



No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Rp. 28,403,700	APBD
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 13.099.900	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 3.635.700	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 2.479.500	APBD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 9.188.600	APBD
B.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Rp. 33.187.200	APBD
5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 5.727.200	APBD
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Rp. 10.898.000	APBD

Mangkutana, 8 Juli 2025

Pihak Pertama,  
KASUBAG. PERENCANAAN DAN  
KEPEGAWAIAN



Pihak Kedua,  
SEKRETARIS CAMAT,

**SAMUEL NASRANI, S.IP**

  
**MERI, S.Pi**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Penjelasan 1

**Sasaran** : TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah melakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran , Rencana Kerja Anggaran Perubahan, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran perubahan, Laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan, LKPJ dan laporan evaluasi.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, tercermin dari presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah capaian penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar di bagi jumlah seluruh penunjang urusan perangkat daerah dikali 100%	Sub bagian perencanaan

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan

		dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir
--	--	--

## Penjelasan 2

**Sasaran** : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH DENGAN BAIK

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

### **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semakin tinggi capaian presentase capaian kinerja administrasi kepegawaian berarti pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah semakin baik.	Jumlah capaian dokumen/laporan administrasi kepegawaian dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang ditargetkan dikali 100%	Sub Bagian Kepegawaian

### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MANSYUR, S. Sos**

Jabatan : KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAMUEL NASRANI, S.IP**

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangkutana, 8 Juli 2025

Pihak Pertama,  
KASUBAG. UMUM DAN  
KEUANGAN,

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS CAMAT,



**SAMUEL NASRANI, S.IP**

**MANSYUR, S.Sos**



**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KANTOR CAMAT MANGKUTANA  
TAHUN ANGGARAN : 2025

<b>No</b>	<b>SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<b>A.</b>	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)</i>	<i>100%</i>
1	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 Org
2	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	18 Laporan
<b>B</b>	<i>Terlaksananya administrasi BMD pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)</i>	<i>100%</i>
1	Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
<b>C</b>	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)</i>	<i>100%</i>
1	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
2	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket
3	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket
4	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36 Dokumen
5	Terfasilitasinya kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
6	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
<b>D</b>	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)</i>	<i>100%</i>

1	Terlaksananya pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit
2	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 Unit
3	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit
<i>E</i>	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase rata-rata capaian kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</i>	100%
1	Teragendanya penyediaan surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan
2	Terbayarnya Rekening telepon, listrik dan air	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
3	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan
4	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
<i>F</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</i>	100%
1	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit
2	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21 Unit
3	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit
4	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12 Unit



No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2,114,774,320	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 29,205,500	APBD
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 12,712,000	APBD
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3,191,500	APBD
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 5,986,080	APBD
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 5,033,000	APBD
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3,600,000	APBD
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 119,110,000	APBD
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 78,210,000	APBD
10.	Pengadaan Mebel	Rp 6.641.000	APBD
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 24,192,000	APBD
12.	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 15,068,000	APBD
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 13,477,700	APBD
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 59,600,400	APBD
15.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 7,500,000	APBD
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 90,960,000	APBD
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 25,460,000	APBD
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 13,490,000	APBD

19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 20,880,000	APBD
20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 8,630,000	APBD

Mangkutana, 8 Juli 2025

Pihak Pertama,  
KASUBAG. UMUM DAN  
KEUANGAN



**MANSYUR, S.Sos**

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS CAMAT MANGKUTANA,



**SAMUEL NASRANI, S.IP**



**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Penjelasan 1

**Sasaran** : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN DENGAN BAIK

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, pencapaian tujuan untuk kepentingan Bersama sehingga system keuangan bisa teratur dan baik

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase administrasi keuangan terselenggara dengan baik	Semakin tinggi capaian presentase administrasi keuangan akan terselenggara dengan baik	Jumlah capaian dokumen/laporan administrasi keuangan dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan administrasi keuangan di kali 100%	Sub bagian Umum & Keuangan

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

## Penjelasan 2

### **Sasaran** : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BMD PADA PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

### **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Semakin tinggi capaian presentase barang milik daerah yang diadministrasikan maka akan terwujud administrasi barang milik daerah yang berkualitas	Jumlah capaian dokumen/laporan administasi barang milik daerah dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan barang milik daerah yang diadministrasikan dikali 100%	Sub Bagian umum & keuangan

### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

### Penjelasan 3

**Sasaran** : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH DENGAN BAIK

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Semakin tinggi capaian presentase capaian kinerja administrasi umum maka akan terlaksana administrasi umum perangkat daerah yang baik	Jumlah capaian dokumen/laporan administasi administrasi umum dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan administrasi umum perangkat daerah yang ditargetkan dikali 100%	Sub Bagian umum & keuangan

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir



#### Penjelasan 4

**Sasaran** : TERSEDIA NYA BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

#### **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase BMD perangkat daerah penunjang urusan yang terpenuhi	Tersedianya BMD penunjang urusan pemerintah daerah tercermin dari BMD perangkat daerah penunjang urusan yang terpenuhi	Jumlah unit BMD yang diadakan dibagi jumlah unit BMD yang diadakan sesuai target dikali 100%	Sub Bagian umum & keuangan

#### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

#### Penjelasan 5

**Sasaran** : TERSEDIA NYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
SESUAI STANDAR

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi



### **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RELEVANSI</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semakin tinggi presentase capaian kinerja jasa penunjang urusan perangkat daerah maka akan tersedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai standar	Jumlah capaian dokumen/laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dibagi jumlah seluruh dokumen/laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan dikali 100%	Sub Bagian umum & keuangan

### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>TARGET</b>	<b>PENJELASAN</b>
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjelasan 6

**Sasaran** : TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DAERAH DENGAN BAIK

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi

### **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RELEVANSI</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan daerah tercermin dari indicator kinerja	Jumlah capaian pemeliharaan barang milik daerah dibagi jumlah seluruh pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara sesuai target dikali 100%	Sub Bagian umum & keuangan

### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>TARGET</b>	<b>PENJELASAN</b>	
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir	



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALFREDI BORO**

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DARMAWATI, SE**

Jabatan : CAMAT MANGKUTANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangkutana, 8 Juli 2025

Pihak Pertama,  
KASI. PEMERINTAHAN UMUM

**ALFREDI BORO**

Pihak Kedua,  
CAMAT MANGKUTANA,



**DARMAWATI, SE**



LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KANTOR CAMAT MANGKUTANA  
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
A.	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100%
1.	Terlaksana rapat forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Dokumen
B	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	100%
2.	Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	22 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 27,348,100	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp 6,240,900	APBD



Pihak Kedua,  
CAMAT MANGKUTANA,

**DARMAWATI, SE**

Mangkutana, 8 Juli 2025  
Pihak Pertama,  
KASI. PEMERINTAHAN UMUM

**ALFREDI BORO**



**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Penjelasan 1

**Sasaran** : Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah koordinasi antar pihak PORKOPIMCAM Kecamatan Mangkutana yang dilaksanakan setiap bulannya membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase capaian kinerja koordinasi pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan dibagi sesuai target dikali 100%	Seksi Pemerintahan Umum

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir

## Penjelasan 2

**Sasaran :** *Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah koordinasi dalam mengawasi program kegiatan desa, melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan RAPBDesa, serta pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan

### **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan baik	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dibagi sesuai target dikali 100%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD, S.AN**

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DARMAWATI, SE**

Jabatan : CAMAT MANGKUTANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
CAMAT MANGKUTANA,



**DARMAWATI, SE**

Mangkutana, 8 Juli 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA,

**AHMAD, S.AN**



LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
A	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa yang Dilaksanakan	100%
1.	Terwujudnya partisipasi masyarakat desa masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa	10 Lembaga
2.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	12 Laporan
B	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	100%
3.	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	12 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 12,241,800	APBD
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 52,997,600	APBD
3.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp 9,940,900	APBD


Mangkutana, 8 Juli 2025

Pihak Kedua,  
CAMAT MANGKUTANA,



  
**DARMAWATI, SE**

Pihak Pertama,  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA,

  
**AHMAD, S.AN**

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025

Penjelasan 1

**Sasaran** : TERLAKSANANYA KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN DESA

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah koordinasi dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat dan Perempuan serta pengawasan pengusulan Pembangunan dalam kegiatan musrenbang

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa yang Dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang baik	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa dibagi sesuai target dikali 100%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir



## Penjelasan 2

**Sasaran** : TERLAKSANANYA FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah koordinasi dalam mengawasi program kegiatan desa, melakukan fasilitasi dalam Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa serta pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan

### **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan baik	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dibagi sesuai target dikali 100%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUSLIM, S.Pd**

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DARMAWATI, SE**

Jabatan : CAMAT MANGKUTANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangkutana, 8 Juli 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM,

  
**MUSLIM, S.Pd**

Pihak Kedua,  
CAMAT MANGKUTANA,



**DARMAWATI, SE**

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
TABEL KINERJA

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
<b>A</b>	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan</i>	<i>100%</i>
1.	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tantara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	8 Laporan
2	Terlaksananya rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	4 Laporan
<b>B</b>	<i>Terlaksananya Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada</i>	<i>100%</i>
1	Terlaksananya koordinasi/sinergitas dengan polri atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 4,533,600	APBD
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 3,911,000	APBD



3	Koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia.	Rp 4,236,000	APBD
---	---	--------------	------



Pihak Kedua,  
CAMAT MANGKUTANA,

**DARMAWATI, SE**

Mangkutana, 8 Juli 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM,

**MUSLIM, S.Pd**

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025

Penjelasan 1

**Sasaran** : TERLAKSANANYA KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah hasil koordinasi terkait penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban serta pengamanan kegiatan Masyarakat. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	Terlaksananya koordinasi terkait sosialisasi dan pengawasan ketentraman dan ketertiban dapat tergambar dari laporan hasil pelaksanaan koordinasi	Jumlah capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah seluruh kegiatan koordinasi sesuai target dikali 100%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan permasalahan terkait laporan ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti

## Penjelasan 2

### **Sasaran** : *Terlaksananya Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada*

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah hasil koordinasi terkait penanganan semua laporan dan temuan pelanggaran perda/perkada. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

### **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya koordinasi terkait tertanganinya pelanggaran perda/perkada tercermin dari presentase koordinasi terkait perda/perkada yang ditegakkan	Jumlah capaian koordinasi terkait pelanggaran perda/perkada yang ditegakkan dibagi sesuai target dikali 100%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan permasalahan terkait koordinasi penegakan perda/perkada yang ditindaklanjuti





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WARSI SALIPADANG, S.E, M.Si**

Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DARMAWATI, SE**

Jabatan : CAMAT MANGKUTANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangkutana, 8 Juli 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

**WARSI SALIPADANG, S.SE, M.Si**

Pihak Kedua,  
CAMAT MANGKUTANA,



**DARMAWATI, SE**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
A	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%
1.	Terlaksananya pelayanan Administrasi Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	12 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Rp 10,745,500	APBD

Mangkutana, 8 Juli 2025

Pihak Pertama,  
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM



**WARSI SALIPADANG, S.E, M.Si**

Pihak Kedua,  
CAMAT MANGKUTANA,



**DARMAWATI, SE**

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025

Penjelasan 1

**Sasaran** : TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan pelayanan publik dengan memfasilitasi administrasi perizinan usaha dan non usaha, surat rekomendasi kegiatan dalam wilayah kecamatan Mangkutana serta pelayanan kependudukan.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Presentase capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan kepada camat yang dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat dengan baik	Jumlah pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan dibagi sesuai target dikali 100%	Seksi Pelayanan Umum

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1.	100	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan dengan banyaknya administrasi lain yang dikeluarkan